

**PELINDUNGAN HAK PASIEN DALAM PELAKSANAAN
INFORMED CONSENT DI KLINIK PRATAMA IBU
TERESA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh:

CHRUSSITA INTAN PUTRI FAUSTINA SARI

NIM : 22.C1.0025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Pelindungan hak-hak pasien adalah salah satu komponen krusial dalam pengelolaan layanan kesehatan, terutama melalui penerapan *informed consent*. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkenalkan aturan baru yang berkaitan dengan hak pasien untuk mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan terhadap prosedur medis yang akan dilakukan. Namun, dalam realisasinya, masih terdapat berbagai masalah yang dapat menghambat terpenuhinya hak-hak pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelindungan hak-hak pasien dalam konteks *informed consent* sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan mengetahui bagaimana hak-hak pasien dilindungi dalam pelaksanaan *informed consent* di Klinik Pratama Ibu Teresa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deksriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap dokter, pasien, serta tenaga medis yang terlibat dalam pelaksanaan *informed consent* di Klinik Pratama Ibu Teresa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelindungan hak pasien dalam *informed consent* sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan peraturan lain yang relevan. Di Klinik Pratama Ibu Teresa, prosedur *informed consent* telah dilaksanakan melalui pemberian informasi yang jelas, pengisian formulir persetujuan tindakan medis, pencatatan dalam rekam medis, dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung pelindungan hak-hak pasien. Pelindungan hak pasien efektif dilakukan baik secara preventif maupun represif. Namun, tetap ada tantangan, antara lain kurangnya pemahaman pasien tentang informasi medis, situasi di mana pasien tidak didampingi keluarganya saat tidak bisa memberikan persetujuan, serta keraguan pasien dalam menandatangani formulir persetujuan tindakan medis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *informed consent* di Klinik Pratama Ibu Teresa pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan peraturan lainnya, tetapi masih memerlukan peningkatan pemahaman pasien dan optimalisasi komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien agar hak-hak pasien dapat terpenuhi secara maksimal.

Kata Kunci: Pelindungan Hak Pasien, *Informed Consent*, Pelayanan Kesehatan, Klinik Pratama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

ABSTRACT

The protection of patient's rights is an important aspect of healthcare services, especially through the implementation of informed consent. The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health provides a new legal framework regarding patient's rights to receive information and give consent to medical treatment. However, in practice, there are still several issues that may affect the fulfillment of patients' rights. This study aims to examine the legal regulation of patient rights protection in informed consent under Law Number 17 of 2023 on Health and to analyze its implementation at Ibu Teresa Primary Clinic. This study uses a socio-legal research method with a descriptive-analytical approach. The data were collected through library research and field research, including interviews with doctors, patients, and healthcare personnel involved in the implementation of informed consent at Ibu Teresa Primary Clinic. The collected data were analyzed qualitatively. The results show that the protection of patients' rights in informed consent is regulated by Law Number 17 of 2023 on Health, Government Regulation Number 28 of 2024, Minister of Health Regulation Number 290/Menkes/Per/III/2008 concerning Consent for Medical Procedures, and other related regulations. The implementation of informed consent at Ibu Teresa Primary Clinic has been carried out through the provision of adequate information, the use of medical consent forms, documentation in medical records, and the application of Standard Operating Procedures (SOPs). The protection of patients' rights is provided through preventive and repressive legal protection. However, several obstacles remain, including patients' limited understanding of medical information, the absence of family members when patients are unable to give consent, and patients' hesitation to sign consent forms. This study concludes that the implementation of informed consent at Ibu Teresa Primary Clinic is generally in accordance with Law Number 17 of 2023 on Health and other relevant regulations. Nevertheless, greater efforts are needed to improve patients' understanding and strengthen communication between healthcare providers and patients to ensure better protection of patients' rights.

Keywords: Patient Rights Protection, Informed Consent, Healthcare Services, Primary Clinic, Law Number 17 Of 2023 On Health.